

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan karakter bangsa. Dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional. Pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan pasal 31 ayat (2) mengharuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Amandemen merupakan pengakuan bahwa pendidikan adalah pranata sosial utama yang harus didukung oleh pranata sosial lainnya termasuk hukum, sosial-budaya, ekonomi, dan politik sebagai suatu kesadaran kolektif.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional untuk mencapai hal di atas adalah dengan menetapkan tiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan beserta indikator kinerja kuncinya. Ketiga pilar tersebut adalah: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan, (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Dalam perkembangan sejarah hingga saat ini, pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui jalur pendidikan kesetaraan. Program pendidikan kesetaraan merupakan garda terdepan dalam

SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA. Pendekatan pengentasan kemiskinan melalui instrumen pendidikan kesetaraan juga dipandang merupakan kebijakan yang tepat karena cukup banyak bukti bahwa pendidikan mampu memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dan produktif. Dengan pemberdayaan masyarakat, kualitas sumber daya manusia akan meningkat dan mampu mengelola sumber-sumber potensi ekonomi, sosial, budaya, dan alam yang ada di lingkungannya secara seimbang. Untuk itu salah satu model layanan untuk mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan memberdayakan masyarakat adalah melalui terobosan dan melalui jalur program-program pendidikan kesetaraan.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C. Penyetaraan hasil belajar pendidikan kesetaraan diatur oleh Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas 20/2003: "Pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007, program Kejar Paket C harus segera mengimplementasikan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana telah mulai dilaksanakan pada pendidikan formal. Masalah pendidikan kesetaraan tidak segera

mengimplementasikan kurikulum baru, pendidikan kesetaraan tidak dapat disebut setara dengan pendidikan formal yang telah melaksanakan terlebih dahulu.

Kendala yang dihadapi pada penyelenggaraan program Paket C sangat kompleks dan sampai saat ini relatif belum bisa dipecahkan secara tuntas. Kondisi tersebut antara lain belum berjalannya pelaksanaan program pembelajaran secara optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa kehadiran peserta didik masih rendah. Sebagai contoh misalnya kehadiran peserta didik Paket C yang dikelola oleh SKB Kota Yogyakarta, yang merupakan lembaga percontohan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, rata-rata kehadiran adalah 57% (tahun ajaran 2006/2007). Padahal lembaga tersebut hanya menetapkan jadwal pembelajaran 3 hari dalam seminggu, dengan jumlah 4 jam pelajaran per hari. Berarti dalam seminggu hanya ada 12 jam pelajaran. Jika di sekolah formal rata-rata 45 jam pelajaran per minggu maka pada program Paket C bila dibandingkan dengan sekolah formal hanya menyediakan waktu 26,6 % dari sekolah formal. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa kehadiran peserta didik Paket C hanya sekitar 57 %, yang berarti materi yang diajarkan pada tatap bila dibandingkan sekolah formal hanya 15 % (57 % dari 26,6). Untuk sampai pada tingkat setara sekolah formal maka peserta didik harus belajar mandiri di rumah sebanyak 85 %. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka tentunya jauh dari setara.

Dari berbagai forum diskusi kelompok tutor kesetaraan yang dilakukan oleh SKB Kota Yogyakarta pada tahun 2006, banyak tutor dari SKB maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengeluhkan rendahnya kehadiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini ditandai

dengan: (a) tingginya ketidakhadiran peserta didik juga tidak seriusnya dalam mengikuti pembelajaran, (b) sebagian besar peserta didik kurang berinisiatif untuk mencari buku-buku pelajaran/modul untuk dipelajari sehingga dalam pembelajaran cenderung pasif, (c) ketergantungan peserta didik pada tutor sangat tinggi, dan (d) motivasi memperoleh pengetahuan, pengalaman cenderung rendah.

Kemudian kendala lain adalah yang berkaitan dengan materi ketrampilan fungsional. Materi ketrampilan fungsional merupakan ciri khas dari muatan kurikulum kesetaraan, yang harus diimplementasikan dalam pembelajaran. Namun dalam praktek di lapangan materi ini kurang mendapat respon yang positif dari peserta didik. Ada sebagian peserta didik yang memandang tidak penting, bahkan merasa tidak diperlukan bagi dirinya. Padahal sebenarnya materi ini sangat penting bagi peserta didik, sebab sekalipun peserta didik sudah bekerja diharapkan ketrampilan fungsional yang diberikan dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

Bagi para penyelenggara program kesetaraan tentunya sangat mengharapkan kondisi peserta didik tersebut tidak terus menerus terjadi. Untuk itu perlu dicari penyebabnya. Berawal dari keadaan ini maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul "Partisipasi Peserta Didik Kesetaraan Dalam Proses Pembelajaran di Kota Yogyakarta"

B. Identifikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, permasalahan yang ada dapat penulis identifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang ditandai tingkat kehadiran peserta didik yang rendah.
2. Rendahnya motivasi peserta didik untuk belajar mandiri di rumah, padahal diharapkan peserta didik lebih banyak melakukan belajar mandiri.
3. Rendahnya motivasi peserta didik mengikuti program pendidikan keterampilan fungsional (*life skills*), padahal materi ini merupakan bagian dari materi pembelajaran yang harus diikuti peserta didik.

C. Pembatasan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada masalah partisipasi peserta didik Paket C dalam proses pembelajaran di SKB Kota Yogyakarta, yang meliputi persiapan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Peserta didik Paket C dibatasi pada peserta didik Paket C reguler binaan SKB Kota Yogyakarta, bukan peserta didik yang berasal dari sekolah formal yang akan mengikuti ujian nasional Paket C.

D. Perumusan Masalah

Pentingnya partisipasi peserta didik Paket C dalam program pembelajaran khususnya di SKB Kota Yogyakarta merupakan permasalahan pokok dalam penelitian ini. Dari pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan “Bagaimana partisipasi peserta didik Kejar Paket C dalam proses pembelajaran di SKB Kota Yogyakarta”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi peserta didik Kejar Paket C dalam proses pembelajaran yang telah diprogramkan oleh SKB Kota Yogyakarta, baik dalam persiapan pembelajaran, proses pembelajaran maupun evaluasi hasil pembelajaran.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi penyelenggara program, penelitian dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi penyelenggaraan program dan sebagai bahan pertimbangan untuk merancang disain/model penyelenggaraan program kesetaraan yang efektif dan sesuai kondisi peserta didik sehingga dapat meningkatkan partisipasi peserta didik.
- b. Bagi para tutor, penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan untuk memilih model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga meskipun dengan waktu yang terbatas mampu mengoptimalkan partisipasi peserta didik.
- c. Bagi peserta didik, dapat sebagai gambaran mengenai keadaan dirinya sehingga dapat digunakan untuk evaluasi diri dalam proses pembelajaran.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu kependidikan, terutama pada aspek pengembangan model-model pembelajaran pada program kesetaraan, yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan.